

PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Fifit Purnama¹ Dan Nadirsyah²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: fifit_purnama22@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to examine the influence of local finance supervision, accountability, and local finance management transparency of the performance of local government of South-West Aceh (Abdya) regency. Population of the research is 44 SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten). The sampling technique used was simple random sampling, 31 SKPK were selected as the sample of the research with 93 respondents in total. The data used in the supervision sector were quantitative types and the data resource was primary resource. The data was collected using questionnaire. The data was analyzed using multiple regression analysis aided by SPSS program of version 20.00.

The result showed that the supervision of the local finance, accountability, and transparency in the finance management either simultaneously or partially influence the performance of the local government of Abdya regency.

Keywords : *Supervision , Accountability , Transparency , Local Government Performance*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tingginya berbagai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan hasil kinerja pemerintah secara maksimal (Auditya et al., 2013). Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya konsep otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintahan termasuk pemerintah di Kabupaten Abdya (Aceh Barat Daya).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2014 Kabupaten Abdya mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa laporan keuangan pemerintahan (ajnn.net, 2015). Opini BPK ini merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Abdya masih terdapat beberapa

kelemahan yang berkaitan dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kelemahan dalam sistem pengendalian intern di Kabupaten Abdya diantaranya terletak pada pengelolaan keuangan tahun 2014 yang belum tertib. Pengelolaan dana kapitasi dan nonkapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak sesuai dengan ketentuan, pengelolaan persediaan pada SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) tidak tertib, nilai investasi nonpermanen pemerintah Kabupaten Abdya sebesar Rp1.448.150.000,00 belum disajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), serta penatausahaan dan pelaporan aset tetap pemerintah Kabupaten Abdya masih belum memadai. Selanjutnya, temuan pada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terlihat pada upaya penyelesaian kasbon yang belum optimal, piutang daerah senilai Rp4.382.703.080,00 tidak dapat diyakini kewajaran nilainya.

Pada kasus lain, pemerintah Kabupaten Abdya memprediksi atau mengestimasi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten) tahun 2015 sebesar Rp105.000.000.000,00 yang disampaikan dalam rapat

paripurna pembukaan pembahasan rancangan APBK tahun 2016 di Aula DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten). Sementara di tahun 2014, SILPA APBK Abdy juga mencapai Rp. 100.000.000.000,00 Terkait hal itu, diduga banyak perencanaan kegiatan termasuk sejumlah proyek yang tidak selesai dikerjakan hingga akhir tahun, sehingga terjadi pembengkakan anggaran. (Acehterkini.com, 2015).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa selama ini pemerintah Kabupaten Abdy belum menerapkan pengawasan khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah secara optimal dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip *good governance* pada kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Karakteristik pelaksanaan *good governance* meliputi antara lain *transparency, responsiveness, consessus orientation, equity, efficiency, dan effectiveness*, serta *accountability* (Mardiasmo, 2006). Berdasarkan karakteristik tersebut dan fenomena yang terjadi di pemerintah Kabupaten Abdy inilah yang menarik peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai kondisi yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari *good governance* serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan *good governance* secara keseluruhan.

Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja suatu organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Mahsun, 2006:4).

Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ulum, 2012:20).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah terdapat pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- 2) Apakah terdapat pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- 3) Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- 4) Apakah terdapat pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- 2) Untuk menguji pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- 3) Untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- 4) Untuk menguji pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Aspek Akademis (Teoritis)

- 1) Bagi pengembangan ilmu akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengetahuan ilmu akuntansi, khususnya berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja.
- 2) Bagi peneliti dapat memperoleh wawasan yang luas tentang kinerja pemerintah daerah terutama mengenai pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pembandingan atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Aspek Praktis (Operasional)

- 1) Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (MenPAN:2007). Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah memerlukan sistem pengelolaan keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar potensi terjadinya kecurangan-kecurangan dan penyimpangan semakin kecil serta adanya kejelasan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan (Sumarsono, 2010:84).

Menurut Ulum (2012:20) pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut.

Menurut Bastian (2006:267) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impacts*).

- 1) Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan keluaran. Indikator

ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

- 2) Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh/dicapai dari suatu kegiatan, baik kegiatan yang berupa kegiatan fisik maupun non fisik.
- 3) Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- 4) Indikator manfaat (*benefit*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- 5) Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.2 Pengawasan Keuangan Daerah

Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Halim dan Iqbal, 2012:37). Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku (Baswir, 1999:129).

Pengawasan keuangan daerah berkaitan erat dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pencapaian keberhasilan suatu visi dan misi membutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal, baik dalam segi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Semakin baik tingkat pengawasan pengelolaan keuangan daerah maka akan menghasilkan kinerja pemerintah yang baik pula.

Wiguna et al., (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Bawasda mampu melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing SKPD dan

meminimalisir penyimpangan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syahputra (2012) yang mengatakan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang baik. Pengawasan yang baik berupa kebijakan pengawasan tersebut dalam jangka panjang lebih diarahkan kepada tindakan pencegahan, perbaikan sistem dan manajemen pembangunan, sedangkan dalam jangka pendek lebih diarahkan kepada pemberantasan KKN dan seluruh penyebab timbulnya inefisiensi.

Selanjutnya, Widanarto (2009) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengawasan internal dan eksternal berpengaruh cukup kuat secara bersama-sama terhadap kinerja pemerintah Kota Bandung. Disisi lain, secara parsial pengawasan internal dalam bentuk penentuan standar untuk pengawasan, pengukuran hasil pekerjaan, perbandingan hasil dengan standar, dan koreksi terhadap penyimpangan berpengaruh positif cukup kuat dengan kinerja. Hal ini karena Bawasda memiliki hubungan kedinasan dengan SKPD yang diawasinya sehingga memungkinkan Bawasda untuk berinteraksi secara intensif dalam melakukan kegiatan pengawasan, sedangkan secara parsial pengaruh eksternal dalam bentuk pengawasan legislatif dan masyarakat berpengaruh positif lemah terhadap kinerja.

2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011:89). Selanjutnya, Mahmudi (2007:11) menjelaskan bahwa akuntabilitas finansial/keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisiensi, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, dimana hasil pertanggungjawaban laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam menilai baik buruknya kinerja pemerintah.

Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian kinerja pemerintah. Wiguna et al., (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah dilakukan, dimana akuntabilitas sendiri merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka hal ini menjadi kewajiban bagi pelaksana pemerintahan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Halim (2002) dan Auditya et al., (2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Auditya et al., (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD, semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam SKPD maka akan semakin meningkatkan kinerja. Selanjutnya, Halim (2002) menyatakan akuntabilitas tersebut meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansial saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintahan (kinerjanya) harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

2.4 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

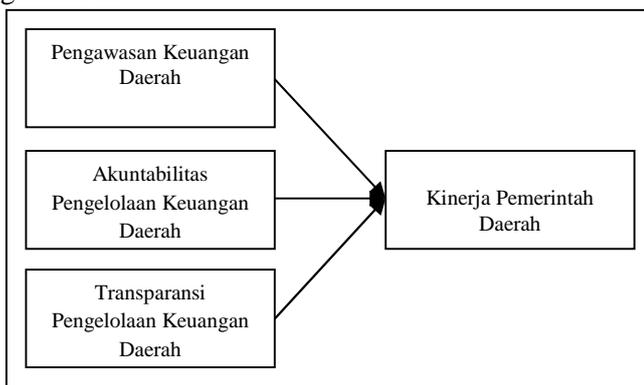
Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, karena merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Adisasmita, 2011:39). Selanjutnya, Mardiasmo (2004:30) menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan lainnya yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Dalam pengambilan keputusan tersebut diperlukan

informasi akuntansi salah satunya berupa laporan keuangan.

Selain pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi kepada publik, sehingga publik dapat mengetahui, memberi kritik dan saran, serta mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga pemerintah akan lebih hati-hati dalam bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian akan melahirkan kinerja pemerintah yang lebih baik. Wiguna et al., (2015) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah kepada publik merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam mengelola dana yang ada dan hal ini adalah bukti bahwa kinerja pemerintah semakin baik.

Hasil penelitian Adiwirya dan Sudana (2015) juga menyatakan bahwa transparansi berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja SKPD. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Auditya et al., (2013). Hasil penelitian Auditya et al., (2013) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD.

Berdasarkan uraian sebelumnya, skema kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Skema Kerang Teoritis

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Abdy.

H₂ : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Abdy.

H₃ : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Abdy.

H₄ : Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Abdy.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal, yaitu studi yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping mengukur kekuatan hubungannya (Kuncoro, 2009:15). Tujuan studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tingkat intervensi dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dan situasi penelitian tidak diatur. Peneliti tidak memiliki kemampuan memanipulasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, tingkat intervensi peneliti rendah, peneliti hanya mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah unit organisasi, yaitu SKPK dalam lingkup pemerintah Kabupaten Abdy. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa kuesioner. Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah *cross sectional*.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPK Kabupaten Abdy yang terdiri dari 44 Dinas/Badan, Kantor, dan Sekretariat. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Instansi, Pejabat pengelola keuangan, dan Sekretaris dari setiap SKPK yang menjadi sampel penelitian. Para responden ini dipilih karena mereka merupakan pihak yang

mempunyai peran dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *simple random sampling*. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada teori Slovin. yang dijabarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

1 = Konstanta

e = *Margin of error* (Kesalahan maksimum yang bisa ditolerir sebesar 10%)

Perhitungan:

$$n = \frac{44}{1 + 44(0,1)^2}$$

$$n = \frac{44}{1 + 44(0,01)}$$

$$n = \frac{44}{1 + 0,44}$$

$$n = 30,56$$

Dengan demikian, diketahui jumlah sampel berdasarkan populasi minimal sebanyak 30,56 atau dibulatkan menjadi sebanyak 31 SKPK. Kuesioner di kirimkan kepada 31 SKPK masing-masing akan didistribusikan sebanyak 3 kuesioner.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner yaitu dengan mendistribusikan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada setiap responden dan diberi kesempatan berjangka waktu untuk menjawab. Setelah 1 minggu, kuesioner akan dikumpulkan kembali oleh peneliti.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pejabat/pegawai yang terlibat dalam

pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban di setiap SKPK dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Indikator untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan indikator yang dijelaskan oleh Bastian (2006:267). Instrument yang digunakan adalah skala Likert 1-5.

Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert 1-5 yang terdiri dari: (1) Sangat Tidak Setuju; (2) Tidak Setuju; (3) Ragu-ragu; (4) Setuju; (5) Sangat Setuju (Sugiyono, 2014:93).

- 1) Pengawasan Keuangan Daerah (X_1).
Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku (Baswir, 1999:129). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan penjelasan dari Terry dan Rue (2001:10).
- 2) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2).
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan setiap SKPK di pemerintah kabupaten Abdy. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Krina (2003).
- 3) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_3).
Transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kemampuan pejabat/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPK yang ada di Kabupaten Abdy untuk mempublikasikan dan mempertanggung jawabkan hasil laporan keuangan kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan

indikator yang dikembangkan oleh Krina (2003).

3.5 Model Penelitian

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

β_0 = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi

X_1 = Pengawasan Keuangan Daerah

X_2 = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

X_3 = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

ϵ = Error

3.6 Pengujian Data

Setelah kuesioner dikumpulkan, dilakukan uji keabsahan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Uji ini dilakukan untuk menunjukkan ketepatan ilmiah yang melekat di dalam penelitian yang dilakukan. Uji validitas dilakukan dengan mengkolerasi masing-masing variabel dengan menggunakan *Pearson Product-moment coefficient* melalui program SPSS. Apabila dilakukan secara manual, nilai korelasi yang diperoleh dari masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product-moment*. Jika korelasi lebih besar dari nilai kritis, maka pernyataan-pernyataan tersebut diartikan signifikan dan memiliki validitas kontras atau terdapat konsistensi internal yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut adalah valid (Sekaran dan Bougie, 2013:225). Teknik pengujian validitas menggunakan *product moment* dari *Pearson* dengan tingkat signifikansi 5%.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengujian ulang. Uji ini dilakukan apabila pernyataan-pernyataan sudah valid. Pengujian reliabilitas juga dilakukan secara statistik, yaitu dengan menghitung besarnya nilai *Crobach's Alpha* dengan bantuan program SPSS. Instrumen dalam penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *alpha* lebih besar dari 0.60. Apabila nilai *alpha* semakin mendekati satu, maka semakin tinggi keandalan konsistensi internal (Sekaran dan Bougie, 2013:317).

3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui dan melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan) pada tingkat signifikansi 5%.

Kriteria sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} = F_{tabel}$ maka menerima H_a dan menolak H_o . Namun apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (secara parsial).

Kriteria sebagai berikut:

- Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Pada tingkat signifikansi 5%, jika $t_{hitung} = t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Begitu juga apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka menerima H_o dan menolak H_a . Pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut.

Pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

- H_{a1} : Terdapat pengaruh antara pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- H_{o1} : Tidak terdapat pengaruh antara pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- H_{a2} : Terdapat pengaruh antara akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

- Ho₂ : Tidak terdapat pengaruh antara akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- Ha₃ : Terdapat pengaruh antara transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- Ho₃ : Tidak terdapat pengaruh antara transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Deskripsi dan Analisa Data

Data dalam penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner. Kuesioner didistribusikan kepada 31 SKPK yang menjadi sampel penelitian. Setiap SKPK dipilih tiga orang responden untuk mengisi kuesioner penelitian. Pendistribusian kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

diantar langsung oleh peneliti ke setiap instansi yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner diberikan kepada kepala instansi, sekretaris dan pejabat pengelola keuangan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan selama dua minggu atau sepuluh hari kerja pada tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016.

Berdasarkan jumlah, kuesioner yang didistribusikan adalah 93 kuesioner atau 31 SKPK yang menjadi sampel penelitian. Terdapat satu SKPK yang tidak mengembalikan kuesioner. Dengan demikian Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 90 kuesioner atau sebesar 96,77 % kuesioner yang kembali. Secara jelasnya mengenai deskriptif data penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Deskriptif Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah SKPK	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
Kuesioner yang didistribusikan	31 SKPK	93 Kuesioner	100
Kuesioner yang tidak kembali	1 SKPK	3 Kuesioner	3,23
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian	30 SKPK	90 Kuesioner	96,77

Sumber: Data Primer Diolah (2016)

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik ini meliputi jenis kelamin, pendidikan terakhir, umur, latar

belakang pendidikan, jabatan, dan masa kerja. Keberagaman karakteristik responden secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Karakteristik Responden

No	Uraian	Fr	(%)
1	Jenis kelamin:		
	Laki-laki	66	73.3
	Perempuan	24	26.7
	Total	90	100
2	Umur:		
	< 30 Tahun	5	5.6
	30-50 Tahun	76	84.4
	>>50 Tahun	9	10.0
	Total	90	100

No	Uraian	Fr	(%)
3	Pendidikan Terakhir:		
	SMA	1	1.1
	D3	4	4.4
	S1	72	80.6
	S2	13	14.4
	Total	90	100
4	Jabatan:		
	Kepala Instansi	30	33.3
	Sekretaris	30	33.3
	Pejabat Pengelola Keuangan	30	33.3
	Total	90	100
5	Masa Kerja		
	< 1 Tahun	0	0
	1-5 tahun	6	6.7
	>>5 Tahun	84	93.3
	Total	90	100

Berdasarkan tabel 2, bisa disimpulkan bahwa jenis kelamin responden didominasi oleh kaum laki-laki sebanyak 66 orang atau sebesar 73.3 % sedangkan sisanya sebanyak 24 orang atau sebesar 26.7 % berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari umur responden, terlihat bahwa umur responden didominasi oleh umur antara 30 sampai 50 tahun sebanyak 76 orang atau sebesar 84.4 %, yang sisanya sebanyak 9 orang atau sebesar 10.0 % berusia diatas 50 tahun dan sebanyak 5 orang atau sebesar 5.6 % berusia dibawah 30 tahun.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas responden telah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 72 orang atau sebesar 80.6%, kemudian diikuti oleh responden dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 13 orang atau sebesar 14.4%, sisanya responden mempunyai tingkat pendidikan D3 sebanyak 4 orang atau sebesar 4.4% dan SMA sebanyak 1 orang atau

sebesar 1.1%. Hal ini berarti pola pikir responden telah memadai untuk memahami konsep pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Selanjutnya, pada tabel 2 juga terlihat bahwa jabatan responden dalam penelitian ini terdiri dari kepala dinas/badan/kantor/sekretariat, sekretaris, dan pejabat pengelola keuangan masing-masing sebanyak 30 orang atau sebesar 33.3%. Kemudian jika ditinjau dari masa kerja responden terlihat bahwa mayoritas responden mempunyai masa kerja diatas 5 tahun yaitu sebanyak 84 orang atau sebesar 93.3% dan sisanya responden mempunyai masa kerja antara 1 sampai 5 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 6.7%.

4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Hasil Pengujian validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Item Pernyataan	Variabel	Validitas*		Reliabilitas	
		Koefisien Korelasi	Ket.	Cronbach Alpha	Ket.
Y ₁		0.738	Valid	0.713	Reliabel
Y ₂	Kinerja	0.655	Valid		
Y ₃	Pemerintah	0.657	Valid		
Y ₄	Daerah (Y)	0.875	Valid		
Y ₅		0.524	Valid		

Item Pernyataan	Variabel	Validitas*		Reliabilitas	
		Koefisien Korelasi	Ket.	Cronbach Alpha	Ket.
X1 ₁		0.563	Valid		
X1 ₂		0.656	Valid		
X1 ₃	Pengawasan	0.573	Valid		
X1 ₄	Keuangan Daerah	0.576	Valid	0.615	Reliabel
X1 ₅	(X1)	0.318	Valid		
X1 ₆		0.658	Valid		
X1 ₇		0.646	Valid		
X2 ₁		0.552	Valid		
X2 ₂		0.418	Valid		
X2 ₃	Akuntabilitas	0.706	Valid		
X2 ₄	Pengelolaan	0.645	Valid	0.637	Reliabel
X2 ₅	Keuangan Daerah	0.246	Valid		
X2 ₆	(X3)	0.753	Valid		
X2 ₇		0.477	Valid		
X2 ₈		0.481	Valid		
X3 ₁		0.448	Valid		
X3 ₂	Transparansi	0.789	Valid		
X3 ₃	Pengelolaan	0.821	Valid	0.788	Reliabel
X3 ₄	Keuangan Daerah	0.707	Valid		
X3 ₅	(X3)	0.630	Valid		
X3 ₆		0.775	Valid		

*Valid : Jika nilai koefisien korelasi > nilai kritis korelasi r product moment N=90; 0.207

*Reliabel : Jika nilai cronbach alpha > 0.60

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS (2016)

Berdasarkan tabel 3, bisa disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner penelitian dinyatakan valid dan reliabel. Hal ini terlihat dari nilai koefisien korelasinya yang lebih tinggi dari pada nilai kritis korelasi r *product momen* dan nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0.60.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut, nilai F_{hitung} sebesar 30.755 sementara F_{tabel} sebesar 2.71. Jadi sesuai dengan hipotesis yang diajukan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5%,

H_a diterima dan H_o ditolak. Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Besarnya pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilihat nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.518. Hal ini memiliki arti bahwa 51.8% Kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan selebihnya sebesar 48.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan di dalam penelitian ini.

Tabel 4
Regresi Linear Berganda

	Unstandardized Coefficients		Simultan		Parsial		Ket
	B	Std. Error	F	Sig.	t	Sig.	
Konstanta	-1.023	.585			-1.749	.084	
Pengawasan Keuangan Daerah	.318	.104			3.055	.003	H2 diterima
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	.852	.121	30.755	.000 ^b	7.068	.000	H3 diterima
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	.116	.057			2.038	.045	H4 diterima
Koefisien Determinasi (R^2) = 0.518			$F_{tabel} = 2.71$				
			$t_{tabel} = 1.98761$				

Sumber: Data Primer Diolah menggunakan SPSS (2016),

Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 4.8, nilai t_{hitung} sebesar 3.055 dan t_{tabel} sebesar 1.98761. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa secara parsial pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil perhitungan untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan angka t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} yaitu t_{hitung} sebesar 7.068 dan t_{tabel} sebesar 1.9876.

Selanjutnya hasil perhitungan untuk variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah, diperoleh t_{hitung} sebesar 2.038. angka ini lebih besar dari pada nilai t_{tabel} sebesar 1.98761. Dengan demikian bisa dikatakan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.4 Pembahasan

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dapat menjadi sarana untuk mengetahui apakah suatu instansi pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Dengan adanya pelaksanaan pengawasan keuangan daerah akan membantu mengontrol pelaksanaan kegiatan

pemerintah baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban, dengan demikian dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, pengawasan memiliki pengaruh yang penting. Hal ini disebabkan karena dalam pencapaian keberhasilan dibutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal. Disamping itu, sistem pengawasan yang baik dalam jangka pendek dapat mengarah kepada tindakan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan seperti upaya pemberantasan KKN (Syahputra, 2012). Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah yang baik akan mendorong pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan *good governance*. Dengan demikian, semakin baik pengawasan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Abdiya telah memiliki sistem pengawasan keuangan daerah yang baik. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 4.35. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pihak Inspektorat maupun BPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seperti mengawasi setiap

kegiatan atau program SKPK, melakukan *financial audit* terhadap laporan keuangan pada setiap SKPK dalam upaya mengevaluasi kinerja. Selain itu adanya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh SKPK setelah adanya evaluasi. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pada setiap SKPK tidak semata-mata melakukan tindakan pemeriksaan namun juga melakukan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widanarto (2009) dan Wiguna et al., (2015) yang menunjukkan bahwa Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik tingkat pengawasan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah dilakukan. Akuntabilitas tersebut meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga menjadi sarana untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansial saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Halim, 2002).

Asaz Akuntabilitas merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh pemerintahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penerapan asaz akuntabilitas yang baik akan meningkatkan tingkat kinerja pemerintah menjadi lebih baik.

Secara keseluruhan, penerapan asaz akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam jajaran pemerintah Kabupaten Abdiya sudah baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata yang diperoleh dari jawaban responden berdasarkan tingkat kesetujuan terhadap pernyataan yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar

4.19. Hal ini terbukti pada tahap proses pembuatan dan/atau pengambilan keputusan keuangan SKPK telah memenuhi nilai etika dan standar yang berlaku, adanya bukti-bukti transaksi yang akurat dan lengkap dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Selain itu pada setiap SKPK tersedianya sistem informasi untuk membantu SKPK dalam mengevaluasi hasil kinerja serta tersedianya sarana bagi pihak manajemen untuk memonitoring program yang dilakukan.

Selanjutnya, hasil pengujian penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mempunyai tingkat pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel pengawasan dan transparansi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil koefisien regresi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,852. Hal ini berarti setiap 1 angka/nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menaikkan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,852. Hal demikian tidak terlepas dari jawaban responden yang memandang akuntabilitas merupakan asaz yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pemerintahan demi meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan merupakan amanat perundang-undangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Auditya et al., (2013), Wiguna et al., (2015) dan Asrida (2012) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah, maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan. Penerapan asaz transparansi penting untuk diterapkan. Hal ini disebabkan karena penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Dengan demikian, hal ini juga dapat menjadi bukti tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik (Wiguna et al., 215).

Secara teoritis pemerintah harus menangani dengan baik kinerjanya dengan memperhatikan 2 aspek transparansi, yaitu: 1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan 2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi harus seimbang, juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu (Auditya et al., 2013).

Pada pemerintah Kabupaten Abdy, penerapan asas transparansi pada pengelolaan keuangan daerah telah memadai. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata yang diperoleh dari jawaban responden berdasarkan tingkat kesetujuan terhadap pernyataan yang berhubungan dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 3.84. Pemerintah Kabupaten Abdy juga telah menyediakan berbagai sarana pendukung seperti adanya kotak pengaduan suap yang tersedia di setiap SKPK pemerintah Kabupaten Abdy, tersedianya kotak kritik dan saran atas pelayanan suatu instansi yang tersedia di setiap SKPK pemerintah Kabupaten Abdy dan tersedianya informasi keuangan yang dapat diperoleh melalui media massa maupun papan pengumuman yang disediakan oleh beberapa SKPK.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Auditya et al., 2013, Wiguna et al., (2015) dan penelitian yang dilakukan Adiwirya dan Sudana (2015) yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
- 2) Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin baik tingkat pengawasan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.
- 3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah.

- 4) Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian, tidak disertai wawancara sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner.
- 2) Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas dan mampu menjelaskan kinerja pemerintah daerah pada SKPK Kabupaten Abdy sebesar 51.8%, sedangkan sisanya sebesar 48.2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
- 3) Populasi dalam penelitian ini hanya pada SKPK Kabupaten Abdy sehingga kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada SKPK kabupaten Abdy dan tidak bisa digeneralisasi untuk SKPK pemerintah kabupaten/kota yang lain.

5.3 Saran

Saran untuk Pengembangan Teori

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang ada, peneliti memberikan beberapa saran kepada peneliti selanjutnya. Adapun saran yang dimaksud adalah:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk mengganti teknik pengumpulan data yaitu dapat berupa teknik wawancara ataupun teknik lainnya sehingga dapat menggali informasi yang lebih detail dan meminimalisir permasalahan subjektif dan keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan.
- 2) Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

- 3) Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada seluruh SKPK pemerintah kabupaten/kota yang lain.

Saran untuk Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Abdy agar dapat memperhatikan hal-hal yang mendukung meningkatnya kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik seperti pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan pemerintahan *good governance* sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Adiwirya, M Firdiansyah., dan Sudana Putu. 2015. Akuntabilitas, Transparansi Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol.11, No. 2.
- Asrida. 2012. Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan* Vol 1, No. 1.
- Auditya, Lucy., Husaini dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, *Jurnal Fairness* Vol 3, No. 1.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Baswir, Revrison. 1999. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Edisi ketiga. BPFE: Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, A. dan Iqbal M., 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- [Http://www.ajnn.net/news/banyak-penemuan-menyimpang-kabupaten-abdy-dihadiahi-wdp/index.html](http://www.ajnn.net/news/banyak-penemuan-menyimpang-kabupaten-abdy-dihadiahi-wdp/index.html). Diakses pada 8 Januari 2016 Jam 15:12.
- [Http://www.acehterkini.com/2015/11/silpa-105-milyar-yara-sorot-kinerja.html](http://www.acehterkini.com/2015/11/silpa-105-milyar-yara-sorot-kinerja.html). Diakses pada 7 Januari 2016 jam 09:15.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Kuncoro. Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3*. Erlangga: Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- _____. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2 No.1.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/09/M. PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah*.
- Sekaran, Uma and Roger Bougie. 2013. *Research Method for Business*. Sixth Edition. Italy: Printer Trento Srl.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumarsono. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syaputra. Zubir. 2012. *Pengaruh Pengawasan, Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh Provinsi Aceh*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Banda Aceh:

Program Pascasarjana Universitas Syiah
Kuala.

Terry, George and Rue, Leslie W. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alih Bahasa: G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara.

Ulum, Ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bumi Aksara: Jakarta.

Widanarto, Agustinus. 2009. *Pengaruh Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bandung*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Wiguna, Made BS., Yuniartha G., dan Darmawan N. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, *e-Journal* Vol. 3 No. 1.